

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abar, Ahmad Zaini. *1966-1974 Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LkiS, 1995.
- Abidin, Wikrama Iryans. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Azwar, *4 Pilar Jurnalistik*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Cranston. *What Are Human Rights?* New York: Basic Books, 1973.
- Curran, James. *Media and Power*. London: Routledge, 2002.
- Girsang, Juniver. *Penyelesaian Sengketa Pers*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*. Bandung: Penerbit Alumni, 1994.
- Hutchinson, Terry. *Researching and Writing in Law*. Sydney: Lawbook Co, 2002.
- Kristeva, Nur Sayid Santoso. *Manifesto Wacana Kiri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Luwarso, Lukas. *Pers dan Pilkada 2005*. Jakarta: Sekretariat Dewan Pers, 2005.
- Manan, Abdul. *Di Bawah Bayang-Bayang Krisis*, Jakarta: Aliansi Jurnalis Indonesia, 2015.
- ., Arfi Bambani, Wenri Wanhar, Agustinus Eko Raharjo, Wenseslaus Manggut. *Semangat Sinargalih*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- McQuail, Dennis. *Mass Communication Theory*. London: Sage Publications, 2005.

- MD, Moh. Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- . *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2001.
- Nugraha, Dwi Putra, Febriantoro Suardy, dan Jonker Sihombing. *Mengamandemen Ketentuan yang Tidak Dapat Diamandemen dalam Konstitusi Republik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018.
- Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. *Mapping the landscape of the media industry in contemporary Indonesia. Report Series. Engaging Media, Empowering Society: Assessing media policy and governance in Indonesia through the lens of citizens' rights. Research collaboration of Centre for Innovation Policy and Governance and HIVOS Regional Office Southeast Asia, funded by Ford Foundation*. Jakarta: CIPG and HIVOS, 2012.
- Roper, Brian S. *The History of Democracy - A Marxist Interpretation*. New York: Pluto Press, 2013.
- Said, Salim. *Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto*. Jakarta: Mizan Pustaka, 2016.
- Sen, Krishna dan David Hill. *Politics and the Media in Twenty First Century Indonesia*. London: Routledge, 2011.
- Siahaan, Hotman dan Tjahjo Purnomo. *Tajuk-tajuk dalam Terik Matahari: Empat Puluh Tahun Surabaya Post*. Jakarta: Yayasan Keluarga Bakti, 1993.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Sebuah Tinjauan Singkat*, Edisi ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sulistyowati Irianto dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Syamsudin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Tapsell, Ross. *Kuasa Media di Indonesia*. Serpong: Gajah Hidup, 2017.
- Tebba, Sudirman. *Hukum Media Massa Nasional*. Ciputat: Pustaka irVan, 2007.
- Waaldijk, Kees. *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problems, Questions, Hypotheses, Sources, Methods*. Leiden University, 2009.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Ragam-Ragam Penelitian Hukum, dalam Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. Editor: Sulistyawati Irianto & Sidharta, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Edisi Pertama, 2009.

Winters, Jeffrey A. *Oligarki*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) Nomor 03/Per/Menpen/1969 tentang Lembaga Surat Izin Terbit dalam Masa Peralihan bagi Penerbitan Pers Jang Bersifat Umum

Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)

Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1963

Peraturan Dewan Pers Nomor: 6/Peraturan-DP/V/2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 Tentang Kode Etik Jurnalistik

Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 tentang Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman Perilaku Penyiaran

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran

## JURNAL

Besar, Abdulkadir. "Pemilihan Umum dan Pencalonan Presiden oleh Rakyat", *Jurnal Ketahanan Nasional* III Nomor 3 (1998).

Dewan Pers, Mengungkap Independensi Media, *Jurnal Dewan Pers*. Nomor 9 (2014): <https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/90271.jurnal%20edisi%209juni.pdf>.

Franz dan Keebet Benda Beckmann, ed., *The Dynamics of Plural Legal Orders, Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* 38, Nomor 53-54 (2006).

Harahap, Krisna. "Upaya Penegakan Kemerdekaan Pers di Indonesia sebagai Salah Satu Pilar Demokrasi," *Syiar Hukum* 11, Nomor 3(2009).

Handrini Ardiyanti, "Keberpihakan Televisi pada Pemilu Presiden 2014", *info singkat pemerintahan dalam negeri* VI, No. 10 (2014).

Haryanto, Ignatius. "Media Ownership and Its Implications for Journalists and Journalism in Indonesia" dalam Krishna Sen dan David T. Hill, *Politics and the Media in Twenty-First Century Indonesia* (London: Routledge, 2011).

Hutagalung, Inge. "Dinamika Sistem Pers di Indonesia", *Jurnal Interaksi* 2 Nomor 2 (2013).

I Gusti Ngurah Putra. "Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia". *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, Nomor 2 (2004).

Ibrahim, Zohra. "Jasa Informasi Komersial di Malaysia" *Media Informasi* 11, Nomor 2 (1997).

Imawan, Riswandha. "Kepemimpinan Nasional dan Peran Militer dalam Proses Demokratisasi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, Nomor 1 (2000).

K, Soewargo. "Latar Belakang, Sejarah, dan Perkembangan Hak-Hak Asasi Manusia", *Mimbar Hukum* 5, Nomor 15 (1992).

Kaelan. "Kesatuan Sila-Sila Pancasila", *Filsafat* Nomor 26 (1996).

- . “Pancasila sebagai dasar penjabaran hak-hak asasi manusia”, *Jurnal Filsafat* Nomor 12 (1992).
- Kasjianto, “Media dan Monopoli Dagang: Percetakan dan Penerbitan di Indonesia Pada Masa VOC”, *Jurnal Wacana* 10, Nomor 2 (2008).
- Kunto, Kurniawan dan Nunung Prajanto. “HAM di Indonesia: Menuju *Democratic Governances*”, *Ilmu Sosial dan Politik* 8, Nomor 3 (2005).
- Mahdi, Acan. “Kebebasan Pers dan Hak Publik”, *Al-Hikmah* 8, Nomor 1 (2014).
- Masduki. “Jurnalisme Politik: Keberpihakan Media Dalam Pemilu 2004”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu politik* 8, Nomor 1 (2004).
- Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum”. *Faculty of Law of University Pelita Harapan Law Review* 5, No. 3 (2006).
- Mudhofir, Ali. “Nilai, Martabat dan Hak-hak Asasi Manusia”, *Jurnal Filsafat* Nomor 12, Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, 1992.
- Mukrimin, “*The Influence of Mass Media in Political Change in Indonesia*”, *Politika* 3, Nomor 2 (2012).
- Nurlatifah, Mufti. “Posisi Undang-Undang Pers Indonesia dalam Ekosistem Media Digital”, *Profetik Jurnal Komunikasi* 11, Nomor 1 (2018).
- Overgaauw, Daniel. “*The Paradoxes of Liberty: The Freedom of Speech re-considered*”, *Amsterdam Law Forum* 2, Nomor 1 (Vrije University Amsterdam, 2009)
- Pangestuti, Sri dan Budi Winarno. “Peran Pers Indonesia Mendorong Demokratisasi”, *Sosiohumanika* 13, Nomor 3 (2000).
- Putra, I Gusti Ngurah. “Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3 Nomor 2 (2004).
- Sahasrad, Herdi. “Pers, Demokrasi dan Negara Indonesia Post-Soeharto: Sebuah perspektif”, *Masyarakat, kebudayaan dan politik* 27, Nomor 1 (2014).
- Siregar, Ashadi. “Media Pers dan Negara: Keluar dari Hegemoni”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 4, Nomor 2 (2000).
- Suharyanto, Agung. “Surat Kabar sebagai Salah Satu Media Penyampaian Informasi Politik pada Partisipasi Politik Masyarakat”, *Jurnal Administrasi Publik* 6, Nomor 2 (2016).

Surahman, Sigit. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik", *Jurnal Lontar* 5, Nomor 2 (2017).

Tapsell, Ross. "Indonesia's Media Oligarchy and the "Jokowi Phenomenon", *Southeast Asia Program Publications at Cornell University*, Nomor 99 (2015).

———. "Politics and the Press in Indonesia: Aburizal Bakrie, the *Lapindo Mudflow*, and *The Surabaya Post*", *Media Asia* 39, 2 (2012).

Uslaner, Eric M. "Corruption and Equality", *CESifo DICE Report* 9, Nomor 2 (2011).

Yustiningrum, RR dan Wawan Ichwanuddin. "Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih dalam Pemilu 2014", *Jurnal Penelitian Politik* 12 Nomor 1 (2015).

#### SUMBER LAIN

Agus Sudibyo, "Pers dan Gerakan Penyelamatan KPK", <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/09/15020091/Pers.dan.Gerakan.Penyelamatan.KPK> (diakses pada 18 Oktober 2018).

Aswab Nanda Pratama, "Mengenang Malari, Saat Mahasiswa Melawan Rencana Investasi Soeharto", 15 Januari 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/15/11070021/mengenang-malari-saat-mahasiswa-melawan-rencana-investasi-soeharto> (diakses pada 3 Desember 2018).

Caroline Damarik, "KPI Hentikan Program "Kuis Kebangsaan" dan "Indonesia Cerdas", [Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2014/02/21/0930004/KPI.Hentikan.Program.Kuis.Kebangsaan.dan.Indonesia.Cerdas](https://nasional.kompas.com/read/2014/02/21/0930004/KPI.Hentikan.Program.Kuis.Kebangsaan.dan.Indonesia.Cerdas) (diakses pada 19 Desember 2018).

Dewan Pers, "Peraturan Dewan Pers," 11 Januari 2019, <https://dewanpers.or.id/kebijakan/> (diakses pada 27 Desember 2018).

Dewan Pers, Mengungkap Independensi Media, *Jurnal Dewan Pers*. Nomor 9 (2014): hal. ix. [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/90271.jurnal%20edisi9\\_juni.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/jurnal/90271.jurnal%20edisi9_juni.pdf) (diakses pada 27 Desember 2018).

Institut for Criminal Justice Reform, "Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik", <http://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/> (diakses pada 19 Oktober 2018).

- Laksono Hari Wiwoho, "Oligarki, Ketimpangan Ekonomi, dan Imajinasi Politik Kita", Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2018/03/07/06460031/oligarki-ketimpangan-ekonomi-dan-imajinasi-politikkita?page=all>. (diakses pada 26 Desember 2018).
- Lim, M. *The League of Thirteen: Media Concentration in Indonesia*. Research report. Tempe, AZ: Participatory Media Lab at Arizona State University. Available online at: [http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim\\_IndoMediaOwnership\\_2012.pdf](http://www.public.asu.edu/~mlim4/files/Lim_IndoMediaOwnership_2012.pdf) (diakses pada 26 Desember 2018).
- Pinta Karana, "Pilpres 2014: Ketika Media Jadi Corong Propaganda". Juli 2014. [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2014/07/140702\\_lapsus\\_media\\_bias](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140702_lapsus_media_bias) (diakses pada 13 Mei 2018).
- Pinta Karana, "Pilpres 2014: Ketika Media menjadi Corong Propaganda", <https://news.detik.com/kolom/2148489/menyoal-netralitas-pers-dalam-kontestasi-pilpres-2014> (diakses pada 18 Oktober 2018).
- Ramadhian Fadillah, "Tragedi 1965 dan Lembaga Super Bernama Kopkamtib", <https://www.merdeka.com/peristiwa/tragedi-1965-dan-lembaga-super-bernama-kopkamtib.html> (diakses pada 25 November 2018).
- Singgih Soares, "7 Media ini dituding Berpihak dan Tendensius", <https://nasional.tempo.co/read/565574/7-media-ini-dituding-berpihak-dan-tendensius> (diakses pada 19 April 2018).
- Thaniago, Roy. 2013. "Mewaspada televisi di Tahun Politik". *Koran Tempo*, 26 Juni 2013.

## **SKRIPSI/ TESIS**

- Aganovi, Ircham Miladi. "Keberpihakan Media Online terhadap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Presiden Republik Indonesia 2014". *Skripsi*, Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2014, hal. 20. <http://www.digilib.ui.ac.id/naskahringkas/2016-11/S58778-Ircham%20Miladi%20Aganovi>.
- Akbar, Arif. "Media, Kampanye, dan Demokrasi di Tataran Lokal". *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gajah Mada, 2014,
- Amania, Nila. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu dalam Masa Kampanye pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" *Skripsi*, Surakarta:

Universitas Sebelas Maret, 2009, hal. 1.  
<https://eprints.uns.ac.id/7333/1/106072210200908041.pdf>.

Ghoza, Mohammad. “*Presidential Threshold* dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013” *Tesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014, hal. 1, [http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku\\_id=75036](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=75036).

Haritajaya, Olyvie Bintang. “Pembredelan Pers di Masa Orde Baru (1966-1998)”. *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan Universitas Sanata Dharma, 2017, hal. 48.  
[https://repository.usd.ac.id/9908/2/121314020\\_full.pdf](https://repository.usd.ac.id/9908/2/121314020_full.pdf)

Kelvin, Mikel. “Pengaturan Kebebasan Berekspresi melalui Media Digital menurut Hukum Internasional dan Penerapannya di Indonesia” *Skripsi*, Makassar: Universitas Hassanudin, 2016, hal. 1,  
<https://core.ac.uk/download/pdf/77627582.pdf>.

## KAMUS

*Black's Law Dictionary*, 2<sup>nd</sup> Ed., s.v. “*Conspiracy*”.  
<https://thelawdictionary.org/conspiracy/> (diakses 4 Januari 2019).

*Black's Law Dictionary*, 2<sup>nd</sup> Ed., s.v. “*Freedom of Expression*”.  
<https://thelawdictionary.org/freedom-of-expression/> (diakses 5 November 2018).

*Black's Law Dictionary*, 2<sup>nd</sup> Ed., s.v. “*General Election*”.  
<https://thelawdictionary.org/general-election/> (diakses 5 November 2018).

*Black's Law Dictionary*, 2<sup>nd</sup> Ed., s.v. “*Non-Partisan*”.  
<https://thelawdictionary.org/non-partisan/> (diakses 5 November 2018).

*Black's Law Dictionary*, 2<sup>nd</sup> Ed., s.v. “*Candidate*”.  
<https://thelawdictionary.org/candidate/> (diakses 5 November 2018).

*Black's Law Dictionary*, 2<sup>nd</sup> Ed., s.v. “*Democracy*”.  
<https://thelawdictionary.org/democracy/> (diakses 6 November 2018).

Kamus Bahasa Indonesia, Edisi ke-3., s.v. “*Konspirasi*”.  
<https://kbbi.web.id/konspirasi> (diakses 31 November 2018).



Mill, David van. “*Freedom of Speech*”, <https://plato.stanford.edu/cgi-bin/encyclopedia/archinfo.cgi?entry=freedom-speech>, diakses pada 10 Oktober 2018.

## **LAPORAN**

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman di bawah pimpinan Dr. Moch. Budyatna, “Analisa dan Evaluasi Hukum Tertulis tentang Azas Kebebasan Pers yang Bertanggung Jawab”, 1993-1994.

Khushal Vibhute dan Filipos Aynalem, *Legal Research Methods: Teaching Material*, Justice AND Legal System Research Institute, 2009.

Martin, G.J. dan Yurukoglu, A. “*Bias in Cable News: Real Effects and Polarization.*” *Paper presented at 12<sup>th</sup> Conference on Media Economics*. Naples, 10 Oktober 2014.

## **WAWANCARA**

Abdul Manan selaku ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Jakarta, 14 November 2018.

